

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui pernyataan Standar *Auuditing* (PSA) No.70 mengharuskan akuntan eksternal Indonesia untuk mempertimbangkan kecurangan pada proses audit laporan keuangan. IAI mengadopsi *Statement on Auditing Standard* No.99 yang menguji pada konsep *fraud triangle* untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan di Indonesia. Menurut SAS No.99, *fraud* adalah suatu tindakan disengaja yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Ada dua tipe *fraud* yaitu memberikan informasi yang salah dalam laporan keuangan dan menyalahgunakan aset (<http://journal.uii.ac.id>).

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang (Sujarweni, 2015).

Kecurangan yang terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas pada adanya keinginan untuk mengambil hak orang lain dan mementingkan

kepentingan pribadi atau kelompok. Demikian halnya dengan kecurangan dalam bidang akuntansi, produk akhir dari proses pengolahan data akuntansi adalah informasi akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam mengartikan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan, pengguna laporan keuangan perlu berhati-hati karena kemungkinan terjadinya bias dalam penyampaian informasi. Jika faktor kecurangan terjadi dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipastikan laporan keuangan disajikan tidak wajar (Suprajadi, 2009).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah Indonesia memang sesuatu hal yang penting untuk dikaji. Perlu di telaah lebih lanjut apa yang menjadi penyebab adanya kecurangan, karena dalam tahun ini bisa kita lihat diberita dan dari berbagai sumber bahwa masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepala pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk kedua kalinya mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (<https://www.purbalinggakab.go.id>). Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK menunjukkan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dikatakan sudah lengkap dan tidak ada keraguan didalamnya sehingga resiko kemungkinan adanya kecurangan data kecil. Namun, sesuai dengan berita yang di muat pada [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) menyatakan bahwa terdapat aparat

pemerintah daerah kabupaten Purbalingga yang diduga terjerat kasus penerimaan hadiah *commitmet fee* dari rekanan dalam proyek *islamic center*.

Dilihat dari kasus tersebut, korupsi merupakan salah satu bentuk dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Korupsi tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi organisasi atau lembaga itu sendiri dan masyarakat (Shintadevi, 2015). Diharapkan untuk kedepannya seluruh SKPD di pemerintah daerah yang bersih dengan prinsip transparansi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri (Ahriati, Basuki dan Widiastuty, 2015).

Proses anggaran pemerintah dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Penyusunan anggaran merupakan tahap penyusunan program yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan di bahas oleh panitia anggaran legislatif dengan tim anggaran eksekutif. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang dimulai sejak APBD di sahkan, pelaksanaan ini secara penuh menjadi tanggung jawab eksekutif. Laporan pertanggung jawaban merupakan laporan atas pelaksanaan APBD, dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal yaitu inspektorat dan auditor eksternal yaitu BPK (Amalia, 2015).

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi telah banyak dilakukan namun hasilnya masih terdapat perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahriati, Basuki dan Widiastuty (2015) menyatakan bahwa jika pengendalian internal

telah dirancang dengan baik dan efektif, maka pengendalian internal dapat melindungi dari adanya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Irwandi (2016) yang menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Chintyana, Wahyuni dan Julianto (2017). Penelitian Budiantari, Yuniarta dan Wahyuni (2017) juga menunjukkan hasil bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Ahriati, Basuki dan Widiastuty (2015) menyatakan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dkk (2017) yang menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu adanya ketidakseimbangan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husnawati, Handajani dan Irwan (2017) sejalan dengan penelitian Amalia (2015) menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, penelitian Putri dan Irwandi (2016) juga menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahriati, Basuki dan Widiastuty,

2015 menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Arista (2015).

Faktor selanjutnya adalah kesesuaian kompensasi. Individu diharapkan telah mendapatkan kesesuaian kompensasi dan tidak melakukan perilaku yang cenderung berlaku curang dalam akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi (Chintyana, Wahyuni dan Julianto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ahriati, Basuki dan Widiastuty (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Irwandi (2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian putri dan Irwandi (2016) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2015) dan Chintyana, Wahyuni dan Julianto (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika, karena pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan adanya moralitas yang baik. Semakin baik moral seseorang maka akan menghindarkan diri dari tindakan kecurangan akuntansi. Menurut penelitian Amalia (2015) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Irwandi (2016). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiantari, Yuniarta dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Morales (2014) menunjukkan bahwa selama perawatan yang cukup dikhususkan untuk membangun kewaspadaan dan mengendalikan risiko berikutnya dari (dugaan) moralitas individu yang lemah secara signifikan mengurangi penipuan. Di dalam organisasi penipuan dapat ditangani tetapi tidak dapat dimusnahkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putri dan Irwandi (2016) yang menggunakan lima variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepatuhan terhadap aturan akuntansi, dan moralitas manajemen. Alasan mengacu pada penelitian ini adalah karena variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, terdapat perbedaan yaitu menghilangkan variabel kepatuhan terhadap aturan akuntansi.

Alasan menghilangkan variabel kepatuhan terhadap aturan akuntansi adalah karena kepatuhan terhadap aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Kusumastuti (2012) terdapat faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu faktor tekanan dalam suatu organisasi perusahaan. Tekanan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan manajemen perusahaan dapat membuat manajer

melakukan segala hal seperti manipulasi dan pemalsuan dokumen untuk mencapai target tersebut. Laporan keuangan akan disusun sebaik mungkin sesuai aturan akuntansi sehingga laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sesuai tujuan.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian Putri dan Irwandi (2016) melakukan penelitian pada 19 perusahaan di Surabaya dengan 79 manajer sebagai responden sedangkan pada penelitian ini melakukan studi penelitian di pemerintah daerah kabupaten Purbalingga dengan mengambil 35 SKPD dan untuk responden mengambil perwakilan tiga orang di dalam SKPD.

Meskipun penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi sudah banyak dilakukan tetapi terdapat hasil penelitian yang belum konsisten. Penelitian ini penting dilakukan untuk tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kecenderungan kecurangan akuntansi dan untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi ?

3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam Penelitian ini penulis menentukan batasan-batasan masalah yang ada dan telah dirumuskan untuk lebih fokus, mendalam, terarah dan konsentrasi dalam penelitian. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi masalah hanya berkaitan dengan :

1. Permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya yang berkaitan dengan “Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Pemerintah Daerah Purbalingga)”.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diambil sampelnya yaitu kepala dinas atau badan, kasubag keuangan, dan staf keuangan.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Membuktikan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pegawai Instansi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong para karyawan dalam menanamkan moralitas individu tanpa adanya asimetri informasi antara kepala bagian terhadap bawahannya maupun sebaliknya, meningkatkan pengendalian internal dalam instansi pemerintah daerah dan kesesuaian kompensasi pada karyawan dalam rangka meminimalisasikan tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi tersebut.
2. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa dalam kajian berikut.